

Sorowako, 27 Juli 2026

Nomor : 01336/COM-S/VII/2026
 Perihal : **Surat Konfirmasi atas Permohonan Tim Liputan SIEJ**

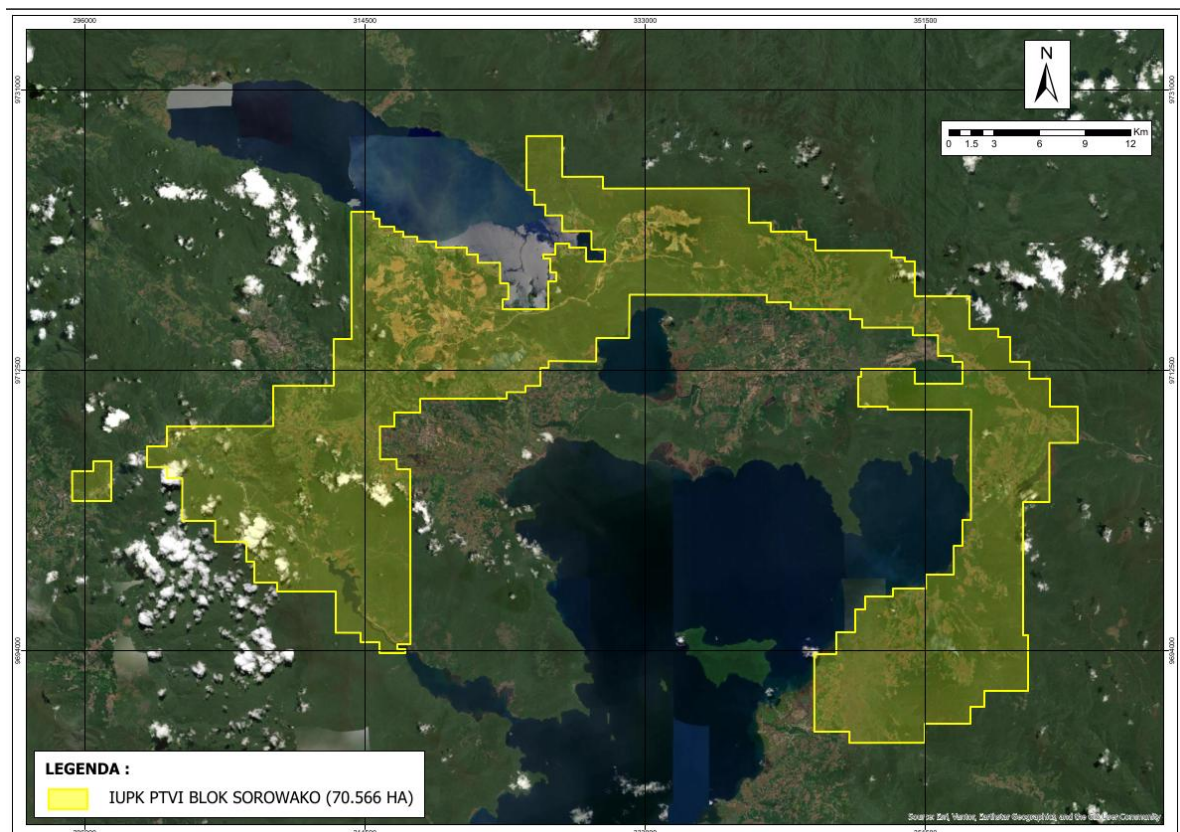
Kepada Yth.
 Tim Liputan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

Dengan hormat,

Sebagai perusahaan yang menjunjung prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik, PT Vale Indonesia Tbk (**PT Vale**) menyampaikan konfirmasi resmi atas surat Permohonan Konfirmasi atas Temuan Lapangan Tim Liputan The Society of Indonesian Environmental Journalists (**SIEJ**) yang terdiri dari lima media: Mongabay Indonesia, Kompas, Betahita, Bollo, dan Koreksi mengenai sejumlah topik di sekitar Sorowako, Sulawesi Selatan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kami atas kerja jurnalistik dan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan.

1. **Apakah PT Vale Indonesia Tbk dapat mengonfirmasi bahwa sebagian wilayah Desa Lioka, Kecamatan Towuti, termasuk dalam cakupan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan SK Nomor 01/1/IUP/PMA/2024?**

Lioka tidak masuk dalam IUPK melainkan masuk sebagai area penunjang/fasilitas seperti untuk jalur pipa minyak, jaringan listrik dan lain-lain.



PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T.(62) 21 524 9000 F.(62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T.(62) 411 366 9000 F.(62) 411 366 9020

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T.(62) 475 332 9100 F.(62) 475 332 9575

www.vale.com/indonesia

2. **Apakah perusahaan memiliki rencana aktivitas operasional (eksplorasi, pematokan, atau produksi) di area yang bersinggungan dengan permukiman dan lahan garapan warga Lioka dalam waktu dekat?**

Berdasarkan rencana kerja saat ini, tidak ada rencana eksplorasi, namun terdapat aktivitas operasional penunjang seperti pemeliharaan pipa, transmisi listrik, dan lain-lain.

3. **Bagaimana perusahaan memastikan proses konsultasi publik dengan warga terdampak, termasuk Desa Lioka, dilakukan sebelum maupun selama masa berlaku izin — khususnya untuk mekanisme yang tercatat dalam dokumen AMDAL?**

PT Vale senantiasa menjunjung tinggi transparansi dan mengedepankan aspek pengelolaan tata lingkungan dengan baik, termasuk konsultasi dan diskusi publik dengan Masyarakat dan Lembaga serta Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. **Apakah perusahaan mengetahui keberadaan Bukit Molindowe sebagai situs sakral dan area pemakaman leluhur suku Padoe? Apakah ada komitmen tertulis untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di area tersebut?**

Di sekitar area Molindowe kami mengidentifikasi terdapat situs masa lampau dan sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Situs ini kami pantau bersama dengan Lembaga Adat PADOE sebagai bagian upaya bersama untuk menjaga kelestarian sekaligus mempertegas dukungan sosial budaya PT Vale terhadap warisan leluhur.

5. **Apakah ada kajian atau pemetaan khusus soal situs-situs budaya/sakral di dalam wilayah konsesi, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?**

PT Vale telah melakukan socio-economic baseline study (SEB) untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan penggunaan lahan masyarakat di sekitar wilayah konsesi. Studi ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam merencanakan kegiatan operasional agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalkan dampak terhadap mata pencaharian.

Perusahaan tetap membuka ruang konsultasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku adat untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dianggap penting atau sakral. Informasi yang diperoleh dari masyarakat ini kemudian diintegrasikan ke dalam perencanaan operasional agar tidak ada aktivitas di area yang memiliki nilai budaya atau spiritual.

PT Vale berkomitmen untuk melanjutkan proses ini secara partisipatif, sehingga perlindungan terhadap situs budaya dan sakral tetap menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

6. **Bagaimana PT Vale memastikan limpasan (run-off) dari konsesi tidak masuk ke daerah tangkapan air (catchment) Danau Matano, dan Towuti mengingat lokasinya berada di dalam Key Biodiversity Area?**

Di lokasi operasi Sorowako, air limpasan dari kegiatan penambangan dan pengolahan dikelola melalui jaringan lebih dari 100 kolam pengendapan. Sistem pengolahan ini menghilangkan padatan tersuspensi dan kontaminan lainnya sebelum dialirkan ke badan air melalui titik penataan yang secara reguler di pantau sesuai dengan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2006 tentang standar kualitas air limbah untuk kegiatan penambangan nikel. Selain kolam pengendapan, PT Vale juga

membangun perimeter emergency, yaitu Perimeter Ditch sebagai perlindungan terluar untuk mencegah limpasan keluar area tambang.

Sorowako Effluent Quality Measurement Results 2025^[POJKS1 F.13]

No	Location	Source	Overflow Point	Processed Volume (m ³)	Parameters, Quality Standards and Measurement Results				
					TSS	Jumlah Cr	Cr6+	Fe	Ni
					<200 ppm	0.5 ppm	0.1 ppm	5 ppm	0.5 ppm
1	Petea Far East	Mining	Petea River	16,056,164	12.50	0.07	0.02	0.03	0.01
2	Petea East	Mining	Petea River	23,146,907	10.00	0.10	0.06	0.03	0.01
3	Petea West	Mining	Matano	13,744,808	13.50	0.09	0.04	0.06	0.01
4	Lorraine	Mining	Matano	1,983,131	10.50	0.05	0.01	0.03	0.01
5	Kathryn	Mining	Matano	5,717,849	9.00	0.05	0.01	0.07	0.01
6	Lamangka 1	Mining	Mahalona	6,282,546	10.00	0.07	0.02	0.03	0.01
7	Lamangka 2	Mining	Mahalona	5,146,607	10.00	0.06	0.01	0.03	0.02
8	Lamangka 3	Mining	Mahalona	9,792,393	12.50	0.15	0.07	0.03	0.01
9	LC-A	Mining	Matano	3,853,042	8.50	0.05	0.01	0.03	0.01
10	Petea Washing Pad	Mining	Matano	73,656	10.00	0.05	0.01	0.03	0.01
11	Petea D3 West	Mining	Salo Lamunto	3,898,304	11.00	0.08	0.03	0.05	0.01
12	CP 4	Coal dan Sulfur Pile	Malili River	2,535	20.00	N/A	N/A	N/A	N/A
13	D Lagoon	Domestic	Matano	391,211	9.00	N/A	N/A	N/A	N/A
14	F Lagoon	Domestic	Matano	226,74	9.00	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Helai Lagoon	Domestic	Matano	14,127	10.00	N/A	N/A	N/A	N/A
16	SMP YPS	Domestic	Matano	8.88	8.00	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Hospital	Domestic	Matano	12,357	10.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Figure 1. Lokasi Titik Penaatan Sorowako (Laporan Keberlanjutan Halaman 170)

7. Apakah ada kolam pengendapan (settling pond) khusus, dan berapa kapasitasnya dibanding proyeksi volume limpasan saat puncak produksi?

Fasilitas sediment pond/kolam pengendapan terintegrasi di wilayah operasi Sorowako dirancang dan dibangun dengan kapasitas yang sangat memadai untuk mengelola seluruh volume air limpasan. Kolam pengendapan di monitor secara reguler untuk memastikan air yang masuk dalam kolam pada titik penaatan sesuai dengan baku mutu yang berlaku. Mengacu pada jawaban nomor 6.

8. Bagaimana perusahaan mengikuti kepatuhan terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya untuk parameter logam berat di Danau Matano dan Towuti?

Khusus untuk area Danau Matano dan Towuti, kami melakukan sampling berkala atas kualitas air danau sesuai dengan klasifikasi peruntukan air yang sudah ditetapkan. Laporan sampling kami laporkan per semester dalam bentuk Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

9. Apakah PT Vale memiliki data pemantauan logam berat (nikel, kobalt, kromium) pada jaringan ikan Butini (*Glossogobius matanensis*) di Danau Matano dan Towuti? Jika ada, sejak kapan dan bisa dibagikan?

Berdasarkan Critical Habitat Assessment (CHA) kami, ikan Butini diidentifikasi sebagai spesies yang menjadi perhatian karena sifat endemiknya. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan selanjutnya akan dirumuskan lebih lanjut ke dalam Biodiversity Management

Plan (BMP) dan Biodiversity Offsets Plan (BOP) yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati secara terencana, berbasis sains, dan berkelanjutan.

Pemantauan kandungan logam berat yang spesifik terhadap ikan Butini belum dilakukan, namun PT Vale telah melaksanakan pemantauan terhadap ikan invasif yang hidup dalam ekosistem yang sama dengan habitat ikan Butini.

Kajian terhadap ikan invasif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan pengendalian populasi spesies invasif yang berpotensi menjadi kompetitor bagi ikan Butini. Dengan demikian, pemantauan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan sekaligus mendukung kelestarian ikan Butini.

Selain pengendalian ikan invasif, PT Vale juga melaksanakan pengelolaan habitat melalui pengendalian pertumbuhan tumbuhan air (hydrophyte) yang mengalami peningkatan populasi (booming) di Danau Matano. Pertumbuhan hydrophyte yang berlebihan dapat mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air sehingga berpotensi berdampak pada habitat ikan Butini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dilakukan pemanenan hydrophyte untuk mengendalikan populasinya, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik sehingga selain berkontribusi pada pemeliharaan kualitas habitat danau, juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan biomassa yang mendukung prinsip ekonomi sirkular.

10. Berapa baseline konsentrasi logam berat di kolom air dan sedimen Danau sebelum ekspansi konsesi dimulai, dan siapa yang melakukan pengukuran itu?

Monitoring parameter logam berat dilakukan pada tahun 1997-2007 merupakan baseline yang kemudian menjadi dokumen pendukung dalam penyusunan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Januari 2008. Data hasil monitoring selama periode tersebut menunjukkan parameter masih di bawah baku mutu. Monitoring dilakukan di Laboratorium Process Technology PT INCO.

11. Apakah ada uji bioakumulasi logam berat pada spesies endemik (ikan Butini) sebagai bagian dari AMDAL, atau AMDAL hanya mengacu pada kualitas air baku?

Sejauh ini pemantauan dan pengujian dilakukan terbatas pada kualitas air danau dan ekosistem biota perairan merujuk pada dokumen RKL RPL. Spesifik untuk bioakumulasi logam berat pada spesies ikan endemik Butini hingga saat ini belum dilakukan.

Dapat kami informasikan bahwa berdasarkan Critical Habitat Assessment (CHA) kami, ikan Butini diidentifikasi sebagai spesies yang menjadi perhatian karena sifat endemiknya. Langkah-langkah penanganan selanjutnya akan dirumuskan lebih lanjut ke dalam Biodiversity Management Plan (BMP) dan Biodiversity Offsets Plan (BOP) yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Pengujian terhadap bioakumulasi logam berat pada ikan Butini kami sertakan dalam proses perumusan ini.

Sebagaimana yang kami jelaskan pada nomor 9 di atas bahwa pemantauan kandungan logam berat yang spesifik terhadap ikan Butini belum dilakukan, namun PT Vale telah melaksanakan pemantauan terhadap ikan invasif yang hidup dalam ekosistem yang sama dengan habitat ikan Butini.

Kajian terhadap ikan invasif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan pengendalian populasi spesies invasif yang berpotensi menjadi kompetitor bagi ikan Butini. Dengan demikian, pemantauan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan sekaligus mendukung kelestarian ikan Butini.

Selain pengendalian ikan invasif, PT Vale juga melaksanakan pengelolaan habitat melalui pengendalian pertumbuhan tumbuhan air (hydrophyte) yang mengalami peningkatan populasi (booming) di Danau Matano. Pertumbuhan hydrophyte yang berlebihan dapat mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air sehingga berpotensi berdampak pada habitat ikan Butini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dilakukan pemanenan hydrophyte untuk mengendalikan populasinya, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik sehingga selain berkontribusi pada pemeliharaan kualitas habitat danau, juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan biomassa yang mendukung prinsip ekonomi sirkular.

12. Berapa luas total ekspansi lahan PT Vale dalam 5–10 tahun terakhir, dan berapa desa yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan ekspansi tersebut?

Berdasarkan IUPK, total luas wilayah konsesi PT Vale seluas 118.017 hektar yang tersebar di tiga provinsi.

- Di Blok Sorowako seluas 70.566 Hektar dan terdapat empat kecamatan area pemberdayaan. Total bukaan lahan mencapai 7.740 hektar atau 11 % dari total Luasan Blok Sorowako, yang terdiri dari 5.975 untuk area penambangan dan 1.765 untuk kebutuhan Pembangunan fasilitas pendukung. Dari total bukaan lahan tersebut, 50.09 persen telah direklamasi progresif.
- Sementara di Blok Bahodopi terdapat 46 Ha bukaan sampai dengan Juni 2026 atau sebesar 0.2 % dari total luasan wilayah Blok Bahodopi – Sulteng.
- Blok Pomala terdapat 171 Ha bukaan lahan sampai dengan Juni 2026 atau sebesar 0.8 % dari total luasan wilayah Blok Pomala – Sultra.

PT Vale sangat berhati-hati dalam melakukan bukaan lahan untuk menghindari paparan lahan terbuka yang bisa memberikan dampak pada lingkungan.

13. Terkait konflik dengan warga Dongi, bagaimana perusahaan menyelesaikan permasalahan ini, mengingat situasi telah berlarut-larut melewati beberapa generasi? Apakah ada opsi pelepasan hak adat di wilayah Bumper?

PT Vale sangat menghormati ikatan historis masyarakat Karunsi'e Dongi dan berkomitmen mengedepankan dialog terbuka. Proses penyelesaian ini sudah dilakukan bersama dengan Pemda Luwu Utara (saat itu) dan oleh Pemda Luwu Timur dengan beberapa kesepakatan yang disetujui para pihak. Namun demikian PT Vale berusaha untuk menjaga komitmen tersebut dengan proaktif membangun dan terbuka atas dukungan pada masyarakat suku Karunsi'e Dongi.

Sesuai kesepakatan yang telah dicapai, saat ini warga Dongi yang dimaksud telah mendiami kawasan pemukiman kembali di koridor Sungai Pontawa Ledu Ledu. Penataan permukiman Dongi di lokasi ini dimaksudkan tidak hanya sebagai pemindahan fisik rumah, tetapi juga sebagai landasan bagi pengaturan kembali ruang hidup, akses terhadap sumber daya, serta pengembangan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi warga.

Saat ini PT Vale bersama dengan warga Dongi sedang menyusun rencana pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan (sustainability livelihood plan). Rencana pengembangan mata pencaharian ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan penghidupan rumah tangga warga yang dipindahkan, termasuk didalamnya aspek ekonomi, layanan dasar, ruang hidup dan kelembagaan. Rencana ini disusun secara aspiratif dan kolaboratif antara Masyarakat Dongi, PT Vale dan pemerintah merujuk pada peraturan pemerintah dan standard internasional, seperti International Finance Corporation performance standard-5 (IFC PS-5).

14. Bagaimana PT Vale membedakan lahan hasil ekspansi yang “kosong” secara legal dari lahan yang secara adat/faktual sudah digarap warga turun-temurun?

Proses ini melibatkan koordinasi dengan Unsur Pemerintah terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga Kementerian Kehutanan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan status lahan yang di sesuaikan dengan Tataruang yang ada. Dan di tuang dalam perijinan teknis berupa Pertek Pertanahan.

15. Untuk warga yang kehilangan akses ke lahan pertanian/kebun akibat ekspansi, skema kompensasi apa yang ditawarkan — tanah pengganti, uang, atau CSR proyek?

Untuk hal ini, PT Vale Indonesia sebagai pemegang amanat pengelolaan area Penambangan untuk kegiatan pertambangan dan mendukung hilirisasi Mineral, memiliki kewajiban untuk mengelola dengan bertanggungjawab.

Dalam wilayah tertentu Dimana dapat dibagi menjadi :

- a. Kawasan Hutan, Dimana Perusahaan melakukan evaluasi atas kondisi penghidupan Masyarakat baik atas keberadaan kebun, akses memanfaatkan hasil hutan seperti Damar, Dimana sesuai peraturan perundangan dilakukan proses pergantian tanam tumbuh, beserta faktor potensi kehilangan penghasilan dan faktor lainnya untuk mempertimbangkan proses resettlement.
- b. Kawasan non hutan tentunya terdapat proses pergantian lahan beserta bagian produktif dan bagian lainnya di permukaan lahan berdasarkan pada proses identifikasi oleh pihak independent.
- c. Perusahaan tetap membuat program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dibuat di dalam Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM) yang disusun Bersama Masyarakat dan pemerintah daerah.
- d. Pemberdayaan tenaga kerja lokal dan program peningkatan kapasitas Masyarakat sebagai bagian dari program terpadu PPM.

Saat ini, selain merujuk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, PT VALE tengah mengembangkan kerangka kerja akuisisi lahan and pemukiman kembali (land acquisition and resettlement framework/LARF) mengacu kepada standard internasional, yaitu International Finance Corporation performance standard-5 (IFC PS-5). Sebagai langkah awal, dokumen kerangka kerja akuisi lahan dan pemukiman kembali telah disusun. Dokumen ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akuisisi lahan, diantaranya meliputi eligibilitas, skema kompensasi, kelompok rentan, penanganan keluhan, pemulihan mata pencaharian, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan dokumen ini akan dilakukan secara konsultatif dan partisipatif dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya.

16. Apakah ada studi independen soal hilangnya mata pencaharian (bukan cuma lahan fisik) akibat ekspansi, mengingat masyarakat kehilangan akses ke sungai, hutan, atau area tangkap ikan sekaligus?

PT Vale telah melaksanakan Socio Economic & Environment Baseline Study sebagai bagian dari proses identifikasi dan pemahaman kondisi lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat aspek lahan fisik, tetapi juga mengidentifikasi potensi dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat dan lingkungan hidup.

17. Berapa luasan rencana penambangan di blok Tabarano dan Tanamalia?

Luasan rencana penambangan PT Vale Indonesia di Blok Tabarano dan Tanamalia sesuai dengan izin IUPK. Saat ini, aktivitas PT Vale di blok tersebut masih pada tahap eksplorasi yang akan memberikan informasi terkait rencana penambangan.

18. Kapan PT Vale melakukan kerjasama dengan IHIP untuk membangun fasilitas nikel limonit?

Kerjasama ini merupakan bagian dari proses kerjasama pengembangan hilirisasi nikel Dimana Huayou Nickel Cobalt sebagai technology provider.

19. Bagaimana update penanganan kebocoran pipa MFO? *Berapa area yang tercemar (sumber air seperti sungai dan danau? Lahan produktif warga? Hutan dan satwa?) Berapa MFO yang berhasil ditangkap dan dikemanakan?

Proses penanganan kebocoran pipa telah selesai dilakukan sesuai arahan dari pihak berwenang dan PT Vale telah menerima surat keterangan status telah selesainya penanggulangan kedaruratan dari KLH berdasarkan hasil pemantauan pemulihan area terkontaminasi.

Namun perusahaan masih mendukung proses pengembalian fungsi lahan persawahan yang ikut terganggu di lima desa di Kecamatan Towuti: Lioka, Baruga, Langkea Raya, Matompi, dan Timampu. Perkembangan di lapangan menunjukkan tren bahwa padi yang ditanam tumbuh dengan baik dan telah dilakukan panen pada pekan keempat Juli 2026.

Sejalan dengan itu, proses pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak juga terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juli 2026, realisasi pembayaran telah mencapai 88,73 persen dari total kewajiban yang ditetapkan.

Proses ini dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akurasi data agar setiap penerima memperoleh haknya secara tepat. Verifikasi dan validasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengakomodasi kondisi di lapangan.

Selain itu, PT Vale telah mengimplementasikan grievance mechanism yang memungkinkan masyarakat terdampak menyampaikan keluhan atau masukan secara

langsung melalui kanal resmi perusahaan maupun pemerintah desa. Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak terkait, sehingga proses pemulihan dan pembayaran berjalan lebih akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat.

20. Terkait kebocoran pipa MFO ini, seperti apa skema ganti rugi kepada warga terdampak?

Dalam penyusunan skema biaya penanganan dampak, PT Vale berkolaborasi dengan Pemda Luwu Timur dan dinas terkait untuk melakukan pemetaan wilayah dan objek terdampak, pengklasifikasian dampak, identifikasi serta verifikasi data secara akuntabel dan auditable.

21. Data menyebut konsesi PT Vale di Blok Tanamalia (17.776,78 Ha) tumpang tindih dengan 16.786,20 Ha kawasan hutan dan 3.657,96 Ha kebun merica warga. Apakah perusahaan mengakui data ini, dan langkah konkret apa yang akan diambil terhadap area yang beririsan dengan kebun aktif warga?

Sejak generasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia tahun 1968 yang selanjutnya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), konsesi PT Vale mencakup Kawasan hutan. Berdasarkan IUPK saat ini, total luas wilayah konsesi PT Vale seluas 118.017 hektar yang tersebar di dalam tiga provinsi, IUPK ini mencakup wilayah Tanamalia. Konsesi atau wilayah IUPK yang berada di dalam Kawasan hutan didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 41 tahun 2004. Terkait area Kawasan hutan di Tanamalia, PT Vale telah memperoleh izin PPKH/IPPKH sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 855 Tahun 2025.

Di dalam area hutan konsesi kami, terdapat aktivitas perkebunan yang berada di dalam Kawasan hutan, termasuk di Tanamalia. Khusus untuk Tanamalia, berdasarkan pemantauan kami, kegiatan perkebunan tersebut dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Terkait area yang beririsan kebun aktif warga, PT Vale berkomitmen untuk meminimalkan dampak dan menghormati hak masyarakat yang terdampak. Saat ini, selain merujuk kepada peraturan pemerintah yang berlaku, PT Vale tengah mengembangkan kerangka kerja akuisisi lahan and pemukiman kembali (*land acquisition and resettlement framework/LARF*) mengacu kepada standard internasional, yaitu International Finance Corporation performance standard-5 (IFC PS-5). Sebagai langkah awal, dokumen kerangka kerja akuisi lahan dan pemukiman kembali telah disusun. Dokumen ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akusisi lahan, diantaranya meliputi ketentuan hak, eligibilitas, skema kompensasi, kelompok rentan, penanganan keluhan kesah, pemulihan mata pencaharian, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan dokumen ini akan dilakukan secara konsultatif dan partisipatif dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya.

Selain hal di atas, Perusahaan juga menyiapkan konsep pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah dalam pengembangan socio-economy Masyarakat.

22. Tahun 2023 perusahaan mengklaim sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, namun laporan mencatat sosialisasi hanya menjangkau satu kepala desa (Loeha) dan tidak mencakup empat desa lain di Loeha Raya. Bagaimana klaim tersebut dijustifikasi dengan cakupan sosialisasi yang terbatas ini?

PT Vale senantiasa membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Tanamalia. Hal ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan tahapan proyek.

Pada September 2023, PT Vale menyampaikan informasi rencana kegiatan eksplorasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, pada 15 Maret 2024 dilakukan konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan perwaillan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat tokoh Masyarakat guna memperoleh masukan terkait kondisi sosial, penguasaan lahan, mata pencaharian, serta potensi dampak kegiatan.

Seiring perkembangan proyek, PT Vale juga melaksanakan engagement per rumpun (stakeholder cluster/hill) melalui pertemuan-pertemuan tematik untuk membahas isu-isu spesifik sesuai peran dan kepentingannya. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan konsultatif di Desa Loeha pada 2 Oktober 2024 sebagai bagian dari penyampaian perkembangan kegiatan eksplorasi, klarifikasi isu yang berkembang, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Di samping itu, PT Vale juga melakukan komunikasi dua arah untuk memastikan setiap tahapan eksplorasi Tanamalia berlangsung secara transparan, dilakukan secara langsung kepada petani yang berpotensi terdampak, khususnya pemilik dan penggarap lahan pada lokasi kegiatan eksplorasi (drilling).

Namun demikian PT Vale tetap mengedukasi penyelesaian berkeadilan dan menguatkan manfaat bersama atas kehadiran kegiatan ini. Sampai dengan saat ini Kami tetap terus berkomunikasi mencari jalan terbaik atas aspirasi masyarakat ini.

23. Bagaimana tanggapan PT Vale atas kekhawatiran potensi longsor mengingat sebagian konsesi berada di ketinggian 350–580 mdpl dengan topografi pegunungan, dan apa upaya mitigasi yang akan dilakukan perusahaan untuk melindungi puluhan sumber mata air yang menurut warga menjadi sumber air bersih utama lima desa?

Kami memahami kekhawatiran tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan Tanamalia yang berada di Loeha, saat ini masih dalam tahap eksplorasi yang telah dilengkapi dengan AMDAL yang disetujui.

Selanjutnya, sebelum memasuki tahapan penambangan, PT Vale akan melakukan kajian AMDAL untuk tahap eksploitasi, yang mana dalam prosesnya akan dilakukan konsultasi umum dengan para pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat. Di dalam kajian AMDAL tersebut, seluruh potensi risiko dampak lingkungan dan sosial akan diidentifikasi

dan ditetapkan langkah-langkah mitigasinya. Berkaitan dengan potensi longsor ataupun bencana lainnya, tercakup dalam kajian studi kerawanan gempa dan kestabilan lahan. Dari hasil studi tersebut, selanjutnya perusahaan akan menyiapkan mitigasi risiko-risikonya. Salah satu bentuk mitigasi risiko pada tahap kegiatan penambangan adalah pelaksanaan reklamasi secara progresif, sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan.

Selain hal tersebut di atas, secara berkala, PT Vale juga melakukan pemantauan dan pengukuran kondisi lingkungan, termasuk diantaranya kualitas air, udara, tanah, curah hujan, dan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan terhadap potensi dampak yang ditimbulkan sebagai bagian dari penerapan tata kelola pertambangan yang baik.

24. Kebun merica di Loeha Raya memiliki ekonomi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Apakah ada kajian tandingan soal potensi kehilangan mata pencaharian ini jika eksplorasi berlanjut ke eksploitasi?

Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban nomor 21 di atas, bahwa PT Vale senantiasa menghormati dan berkomitmen untuk bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional, termasuk potensi kehilangan mata pencaharian.

25. Perusahaan kerap mengklaim mematuhi prinsip Good Mining Practice dan ESG. Bagaimana perusahaan menjelaskan kesenjangan antara klaim tersebut dengan temuan lapangan WALHI (patok tanpa izin, forum tidak representatif, keresahan warga khususnya perempuan)?

Komitmen PT Vale untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) senantiasa dipegang teguh dengan membuka ruang dialog bersama pemerintah dan petani terdampak.

Hal ini dilakukan untuk memastikan solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Perusahaan memastikan tiga hal utama sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dan kesepahaman dengan petani terdampak
- b. Adanya tanggung jawab terkait dampak lingkungan dan sosial dari perusahaan
- c. Adanya ruang diskusi yang difasilitasi pemerintah setempat bersama Masyarakat

PT Vale senantiasa mendorong kerja sama dengan semangat kemitraan dalam suasana saling percaya dan menghormati, untuk menyusun skema penyelesaian masalah sosial, di antaranya penggantian aset masyarakat yang hilang akibat operasi, pemulihan dan alternatif mata pencaharian, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan bisnis lokal, keamanan, serta pencegahan pembukaan area perkebunan yang terus meningkat di area PPKH.

26. Apakah ada AMDAL khusus untuk Tanamalia yang menilai dampak terhadap perkebunan rakyat, bukan hanya kawasan hutan negara?

Kami telah memiliki kajian dampak khusus terkait kegiatan eksplorasi di Tanamalia. Kegiatan eksplorasi tersebut kami ini telah terlingkup dalam Adendum

AMDAL PTVI Blok Sorowako tahun 2025 pada bagian kegiatan Eksplorasi sub blok Towuti. Cakupan kajian dampak yang kami lakukan pada dokumen tersebut sesuai dengan kriteria dari peraturan pemerintah, yaitu komponen lingkungan dan sosial beserta interaksi keduanya yang berada dalam wilayah rencana kegiatan kami. Aktivitas pada tahap eksplorasi adalah mobilisasi peralatan pengeboran dengan cara yang diupayakan seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kami telah menetapkan kerangka kompensasi yang didasarkan pada tingkat dampak yang ditimbulkan, serta secara aktif melakukan dialog dan keterlibatan dengan para pengguna lahan yang terdampak.

27. Apakah perusahaan memiliki SOP tertulis soal persetujuan warga sebelum pengeboran atau pengukuran di lahan yang sudah dikuasai atau diolah secara turun-temurun?

Kami terus berkomitmen untuk mengedepankan dialog dengan Masyarakat terdampak untuk secara partisipatif mencari dan mencapai solusi bersama. Untuk pelaksanaan hal ini kami telah mengembangkan beberapa dokumen terkait, diantaranya :

1. Rencana pelibatan pemangku kepentingan (Stakeholder engagement plan/SEP), yang didalamnya mencakup pemetaan stakeholder, rencana pelibatan/konsultasi, uraian rencana proyek, potensi dampak yang ditimbulkan.
2. Rencana akses lahan (Land Access Plan/LAP), dokumen ini mencakup aspek legalitas, rencana lokasi eksplorasi, inventarisasi dampak terhadap asset diatas lahan, ketentuan hak, dan skema ganti rugi (tanam tumbuh)
3. Mekanisme keluhan kesah (grevance mechanism), dokumen ini memberikan saluran pengaduan keluhan kesah masyarakat terdampak selama pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan proses penanganannya.

Berdasarkan pemantauan kami, khususnya kegiatan perkebunan lada di dalam area rencana eksplorasi IUPK PT Vale di Tanamalia dimulai pada tahun 2010 dan berkembang secara signifikan pada kurun waktu 2012 hingga 2014. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada lahan di dalam kawasan hutan pada area rencana eksplorasi Tanamalia tersebut yang telah diolah secara turun temurun.

PT Vale tetap terbuka terhadap dialog, audit independen, dan kajian ilmiah berbasis data. Namun, kami juga berkepentingan memastikan bahwa pemberitaan dilakukan secara faktual dan berimbang, menghadirkan konteks utuh, serta tidak membangun atribusi tanpa konektivitas teknis yang dapat diverifikasi.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan sebagai bagian dari komitmen kami terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi publik.

Hormat kami,
PT Vale Indonesia Tbk


Budiawansyah
PT Vale Indonesia Tbk

Direktur & Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer